

## **Peranan Multinational Corporations Dalam Industrialisasi Di Indonesia Pada Era Orde Baru**

J. Heryanto

Staf Pengajar Universitas Bina Nusantara Jakarta  
dan

Staf Pengajar Universitas Kristen Petra Surabaya

### **ABSTRAK**

Pada tahap awal industrialisasi, Indonesia mengalami kekurangan modal dan para investor asing bergerak masuk ke berbagai bidang di negeri ini. Di belakang hari, walaupun terjadi industrialisasi, namun diikuti suatu ketergantungan, yang umumnya disebut *dependent development*.

**Kata kunci:** Perusahaan Multinasional, industrialisasi, *dependent development*.

### **ABSTRACT**

*In the early phase of industrialization, Indonesia was short of capital and foreign investment moved into various fields in this country. Later, though industrialization was happened, it will continue to be plagued with dependency, which is normally named dependent development.*

**Key words:** *Multinational Corporations, industrialization, dependent development.*

### **PENGANTAR**

Pada pertengahan 1960-an di dunia ketiga sedang menggejala mengundang masuknya modal asing dalam bentuk Multinational Corporations dengan tujuan untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonominya, menciptakan lapangan kerja dan meraih teknologi. Kehadiran modal asing dalam bentuk Multinational Corporations diharapkan menumbuhkan/melahirkan usaha-usaha lain (*forward linkage and backward linkage*), yang juga akan meningkatkan daya beli masyarakat (*trickle down effect*). Model pembangunan dengan teori modernisasi yang pernah berhasil diterapkan misalnya di Jepang setelah perang dunia kedua, hendak diulangi di dunia ketiga. Nilai yang kontekstual diangkat menjadi universal. Sejarah ditransformasi menjadi ideologi atau menjadi hukum ahistoris.

Tulisan ini akan membahas kegiatan Multinational Corporations dan dampaknya di Indonesia serta membandingkannya dengan Teori Ketergantungan. Dalam tulisan ini akan dipertimbangkan sejumlah pendapat dan data dari berbagai sumber yang tersedia dan akan difokuskan pada kejadian-kejadian di Indonesia pada waktu era orde baru, tanpa menutup mata akan kejadian-kejadian di luar Indonesia.

Sebelum membahas lebih lanjut, nampaknya perlu dipertegas takrif Multinational Corporation (yang selanjutnya akan disingkat dengan MNC), karena akhir-akhir ini muncul istilah lain sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda, misalnya MNC diartikan perusahaan yang beroperasi hanya di beberapa negara, sedangkan World Corporation lebih luas

yaitu di seluruh dunia. Dalam tulisan ini, sengaja digunakan istilah MNC dan bukannya perusahaan multinasional, karena istilah MNC sudah populer di Indonesia. Istilah MNC dalam tulisan ini di-definisikan sebagai perusahaan yang melakukan investasi dan operasi di banyak negara (bukan berarti di dua-tiga negara) dengan maksud mendapat pasar luar negeri yang lebih luas, memudahkan diperolehnya bahan mentah dan memperoleh keuntungan dari biaya produksi atau pajak yang lebih rendah.

Pembahasan dalam tulisan ini berlandaskan atas kerangka pemikiran Fernando Henrique Cardoso yang mengemukakan bahwa walaupun di dunia ketiga terjadi industrialisasi, pembangunan jalan, tetapi tetap ada ketergantungan (*associated-dependent development*). Antara harapan dan kenyataan terjadi jurang yang dalam, karena kegiatan MNC malah mengeksploitasi dunia ketiga habis-habisan. Proses eksploitasi yang dilakukan di Negara Sedang Berkembang, dilakukan atas bantuan kelas komprador (*compradore class*). Mereka ini kelas yang langsung melakukan penindasan di dalam negeri. Tulisan ini bertujuan mengemukakan teori ketergantungan dan mencoba menganalisa pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari 1960-an sampai 1990-an.

## PERIODE 1965 – 1974

Setelah Pemerintah Orde Lama berakhir, Pemerintah Orde Baru mulai melakukan perubahan warna ekonomi Indonesia yang jauh berbeda dengan sebelumnya. Kebijakan yang diambil, dilatar-belakangi hutang yang diharapkan dapat dinegosiasi, keadaan ekonomi yang kacau/krisis (*chaos and collapse*), sehingga jalan yang dianggap paling baik adalah menerima usulan IMF/IBRD untuk mengambil kebijaksanaan pintu terbuka, yang memungkinkan masuknya investor dari berbagai negara ke Indonesia. Dalam kaitan dengan hal ini, terutama selama periode 1965-1968, Richard Robison mensinyalir bahwa :

*“there is little doubt that the Bappenas technocrats were convinced by the IMF/IBRD ideology of free-market economics, which limited the state to providing the fiscal and monetary conditions for capital accumulation, and trusted in the mechanisms of the market to generate maximum growth and efficiency”*

Pada bulan Januari 1967 Pemerintah Orde Baru mengambil keputusan penting dengan mengeluarkan Undang-undang Penanaman Modal Asing (*the Foreign Capital Investment Law No. 1 of January 1967*), maka investor dari berbagai negara mulai masuk ke Indonesia. Apa yang mendasari masuknya MNC ke Indonesia? Pada umumnya keputusan sebuah MNC menanam modalnya di negara sedang berkembang didorong oleh keuntungan yang diharapkan lebih tinggi dibandingkan kemungkinan investasi di negaranya sendiri atau di negara maju yang lain. Keuntungan relatif dari investasi seperti itu tergantung dari faktor-faktor ekonomi maupun politik. Karena itu baik faktor ekonomi maupun politik dipertimbangkan bersama-sama. Sehubungan dengan ini, kiranya tepat pendapat Robert Gilpin :

*“Direct investments are intended to establish a permanent source of income or supply in the foreign economy; consequently, they create economic and political relationships of a lasting and significant character”*

Untuk menarik modal asing, perlu stabilitas politik. Ketidak-stabilan politik, baik yang di dalam praktek berbentuk demonstrasi atau pemogokan akan mengganggu ketenangan investor asing, termasuk ancaman nasionalisasi modal asing. Untuk menjamin kekuatiran investor asing itu, PMA Law (*article 21 and 22*) menyebutkan :

“A guarantee that there is no intention to nationalise foreign assets and a guarantee of compensation payment if nationalisation does occur”

Tetapi dalam praktek, bila stabilitas di nomor-satukan untuk menarik modal asing, dapat terjadi kecenderungan negara menjadi negara otoriter birokratis. Bentuk negara otoriter birokratis, menurut Budiman “mirip dengan konsep Helio Jaguaribe tentang negara fasis kolonial, yakni sebuah negara yang otoriter, yang bekerja sama dengan modal internasional”.

Negara-negara berkembang termasuk Indonesia, sesungguhnya dihadapkan pada dua pilihan : Apakah mereka memilih ketergantungan kepada modal dan bantuan asing atau menempuh jalan mereka sendiri dalam proses menuju swadaya nasional berdasarkan keikut-sertaan rakyat secara aktif dan sadar dalam proses pembangunan. Apabila jalan pertama yang ditempuh, yakni pembangunan yang bergantung kepada asing, seperti yang ditempuh Indonesia pasca 1966, maka akibat yang terjadi sudah jelas, yakni polarisasi yang makin tajam antara si kaya dan si miskin, serta kesediaan untuk memobilisasi sumber-sumber nasional guna kebutuhan asing. Dalam situasi seperti itu menurut Adi Sasono “stabilitas hanya bisa ditegakkan melalui pengetatan politik, karena keresahan sosial dan kemiskinan massal akan merupakan biaya sosial yang harus dibayar bagi pertumbuhan ekonomi di sektor modern dalam rangka integrasi dengan dunia kapitalisme internasional”.

## OPERASI MULTINATIONAL CORPORATIONS DI INDONESIA

Sekarang marilah kita meninjau bagaimana MNC, perusahaan-perusahaan joint-venture atau perusahaan-perusahaan yang mendapat lisensi beroperasi di Indonesia. Dalam proses produksinya, perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik yang PMA, joint-venture atau perusahaan domestik yang mendapat lisensi, tetap tergantung pada perusahaan induknya. PT Multi Bintang yang memproduksi bir, raginya harus didatangkan dari Belanda, PT Boma-Bisma-Indra yang mendapat lisensi dari Deutz untuk memproduksi mesin Diesel, komponen-komponennya masih harus didatangkan dari Jerman, PT Astra yang memproduksi mobil Toyota, tetap harus mengimpor mesinnya dari Jepang, PT IPTN yang membuat pesawat terbang dan helikopter, sebagian besar komponennya harus diimpor. Demikian pula PT Food Specialities Indonesia, PT Unilever dan sebagainya, ada sebagian bahan yang harus diimpor dari negara asalnya. Bahan-bahan dan komponen yang harus diimpor dari negara asal MNC itu, tidak dapat dibeli di tempat lain, karena barang substitusi akan mempunyai komposisi kimia dan karakteristik teknik yang berbeda.

Ketergantungan oleh komponen ini baru ditinjau dari segi teknik, belum lagi harganya yang dipermainkan oleh perusahaan induknya, sehingga di bidang pemasaran juga terjadi ketergantungan. Suatu ketergantungan lain, yang sering dilupakan oleh mereka yang awam di bidang teknik adalah ketergantungan di bidang perencanaan (*design*). Perusahaan PT MHE Dematic Indonesia yang memproduksi *Electric Cranes*, di dalam men-*design steel structure*-nya untuk proyek-proyek di Indonesia harus menggunakan formula (rumus-rumus) yang ditentukan oleh perusahaan induknya di Jerman, dimana sebagian rumus-rumus itu merupakan rumus empiris yang dimasukkan kedalam program komputer. Tugas *design engineer* di Indonesia

hanya memasukkan data-data kedalam komputer dan hasil perhitungan akan keluar sendiri. Bagi *design engineer* yang kreatif dan mencoba menghitung sendiri, tidak mendapat kesempatan untuk menerapkan hasil perhitungannya, karena ditolak atasan. Design yang ditentukan oleh perusahaan induk (*principal*) di negara asal MNC itu tidak diberikan secara gratis, tetapi dari setiap unit produk yang terjual dikenakan *fee*. Ini juga merupakan salah satu faktor yang menambah tingginya harga atas produk yang terjual.

Dalam semua segi aktifitasnya MNC di dunia ketiga pada umumnya dan di Indonesia khususnya, tetap dikoordinir oleh perusahaan di negara asalnya, baik di bidang perencanaan, produksi, pemasaran dan sebagainya. Pendapat ini sejalan dengan pemikiran Robert Gilpin:

*“There is a common pool of managerial, financial and technical resources, and most importantly, the parent operates the whole in terms of a coordinated global strategy. Purchasing, production, marketing, research and so forth, are organized and managed by the parent in order to achieve its long-term goal of corporate growth”*

Dari pembahasan mengenai industri-industri di Indonesia, terlihat jelas bahwa walaupun terjadi perkembangan, namun tetap ada ketergantungan dan nampaknya sejalan dengan teori *Associated-Dependent Development*-nya Fernando Henrique Cardoso. Dalam teori ini, “pemilikan” industri nampaknya tidak penting, apakah dimiliki pihak asing, berbentuk perusahaan patungan atau perusahaan domestik yang bergabung dengan perusahaan-perusahaan asing, tetapi penekanan justru pada siapa yang mengambil keputusan, umumnya berada di luar negeri. Dalam hubungan ini kiranya tepat yang dikatakan Cardoso mengenai kejadian serupa, tetapi berlangsung di Brazil :

*“It does not matter greatly whether the industrial firms are owned out-right by foreigners or are owned by Brazilians associated with foreign corporations, for in either case they are linked to market, investment and decision-making structures located outside the dependent country”.*

Bagaimana organisasi sumber daya manusia dalam MNC? Jelas MNC mengikuti ideologi kapitalis, karena tujuannya untuk mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. Dari sudut pandang Cardoso, MNC yang mempunyai modal yang besar, menganggap buruh hanya sebagai alat produksi. Buruh tak berdaya dipermainkan oleh pemilik modal yang kuat. Kemajuan teknologi juga merupakan ancaman bagi buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan MNC, karena dengan digunakannya peralatan yang canggih, buruh-buruh terancam di-PHK. Bekerja di perusahaan-perusahaan MNC, para calon pekerja tak bebas memilih kerjanya, sehingga tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti sekarang ini di Indonesia, buruh dalam menghadapi pasar kerja sering tak mempunyai banyak pilihan dan harus terpaksa menerima syarat-syarat yang diminta perusahaan. .

Apa yang terjadi setelah buruh diterima dan mulai bekerja? Semakin keras dia bekerja, semakin banyak keuntungan yang diterima majikan. Memang buruh menerima imbalan, tetapi karena adanya *surplus value*, laba sebagian besar jatuh ke pemilik modal. Sebagian personalia yang bekerja di MNC, karena kedudukannya sebagai staff atau manager mempunyai kesempatan untuk mendapat status dan gaji yang besar. Nampaknya hal ini sesuai dengan pendapat Weber yang tidak mementingkan kelas, tetapi lebih menekankan pada tingkat pendapatan (*income*). Kenyataannya di MNC yang personalianya terdiri dari berbagai bangsa, staff orang kulit putih lebih banyak mendapat kesempatan untuk naik tingkat/pangkat dari pada orang Asia termasuk Indonesia.

Beberapa orang Indonesia memang berkesempatan menduduki jabatan manager, tetapi hal ini

dimungkinkan karena posisi-posisi tersebut akan lebih menguntungkan bila diisi oleh orang-orang setempat, misalnya manager pemasaran atau personalia. MNC menunjuk warga negara Indonesia sebagai manager pemasaran/penjualan, karena dianggap lebih mengetahui pasar atau mempunyai hubungan baik dengan konsumen langsung, pedagang-pedagang setempat ataupun memudahkan kontak-kontak dengan kepala-kepala proyek. Sedangkan yang ditunjuk sebagai manager personalia, karena lebih mudah berhubungan dengan buruh. Keadaan ini sejalan dengan asumsi dasar Durkheim, bahwa dalam masyarakat modern, dimana peran orang sangat kompleks, posisi-posisi yang beraneka-ragam hanya dapat diisi oleh orang-orang tertentu. Masyarakat menciptakan mekanisme, sehingga berdasarkan aliran Fungsionalis ini, kedudukan orang ditentukan oleh fungsinya.

## PERIODE 1974-1990

Setelah melewati suatu periode, 1965-1974 yang ditandai dengan *laissez-faire*, filsafat *open-door economic* yang bertujuan meningkatkan secara maksimum pertumbuhan ekonomi dan dengan mengandalkan pada modal perusahaan-perusahaan multinasional atau MNC, maka pada tahun 1974 terjadi sedikit perubahan, yaitu pemerintah menerbitkan serangkaian kebijaksanaan penanaman modal. Kebijaksanaan itu antara lain mengharuskan semua penanaman modal asing berbentuk kerja-sama patungan, mayoritas saham ditetapkan untuk dimiliki peserta nasional dalam waktu 10 tahun dan penggunaan tenaga lokal diutamakan

Secara umum kebijaksanaan 22 Januari 1974 itu memberikan pembatasan bagi pemilikan perusahaan modal asing dan meningkatkan peranan modal nasional. Sejak 1974 hingga 1981/1982, Indonesia melewati suatu periode yang disebut *resurgent economic nationalism*, dimana pemerintah memainkan peran lebih aktif dan agresif dalam pembiayaan, proteksi, memberikan subsidi kepada modal domestik dan investasi langsung. Mengapa terjadi perubahan kebijaksanaan? Nampaknya terjadi pertentangan di dalam negeri antara pemilik modal dalam negeri dan kelompok liberal dari Bappenas. Kelompok pemilik modal dalam negeri juga menyetujui ideologi Kapitalisme tetapi juga Nasionalis dan menghadapi modal asing sangat sensitif, sehingga meminta agar negara campur tangan untuk memperkuat yang nasional. Pendapat ini berkembang di CSIS. Peristiwa Malari tahun 1974 juga mempercepat keluarnya kebijaksanaan. Tetapi yang paling memungkinkan terjadinya perubahan itu, karena momentumnya tepat. Pada waktu itu harga minyak melonjak, sehingga uang berlimpah dan negara kurang membutuhkan kaum teknokrat/liberal dari Bappenas, yang mendapat dukungan kuat dari IGGI, IMF dan World Bank.

Menghadapi kebijaksanaan ini, MNC tidak kekurangan akal. Mereka mengatasinya dengan berbagai cara, diantaranya memberikan andil/saham kosong kepada anggota keluarga pejabat/penguasa/birokrat, yang sebelumnya diseleksi dulu dan dipilih yang tidak terlalu agresif. Hal ini sekaligus dimanfaatkan untuk mendapatkan/ memenangkan tender-tender pemerintah melalui kontak-kontak pribadinya dan pemanfaatan lainnya untuk menghadapi/menyelesaikan masalah-masalah perijinan, pajak dan perburuhan. Sritua Arief dan Adi Sasono juga mensinyalir bahwa “banyak kejadian pihak kapitalis asing memerlukan oknum birokrat atau penguasa atau oknum yang dekat dengan mereka untuk duduk dalam organisasi usaha yang mereka dirikan di Indonesia”.

Andil/saham juga diberikan kepada staf MNC yang warga negara Indonesia non-pribumi, yang mana dinilai sebelumnya cukup *loyal (faithful dog)*. Mereka ini, yang umumnya tidak

mempunyai kekuatan politik, dianggap tidak membahayakan bagi MNC, sehingga kadang-kadang diangkat pula menjadi anggota direksi. Pemberian saham oleh MNC itu tidak dilakukan begitu saja, tetapi ada perjanjian-perjanjian lain dibelakangnya, misalnya diharuskan menandatangani surat hutang sebesar jumlah uang yang kira-kira sama dengan nilai saham yang secara formal diterimanya. Untuk menarik WNI yang bersangkutan, setiap bulan ia menerima imbalan berupa gaji atau insentif lain yang cukup tinggi. Dalam kaitan ini Dick Robison mengatakan : "...jelas bahwa modal asing tidak menginginkan tuntutan-tuntutan bahwa ia harus berbagi andil dengan rekanan dalam negeri, terutama sekali dimana ia seringkali, sebagai akibatnya, membiayai andil dari rekanan dalam negeri, yang dianggap tidak pada tempatnya."

Pembahasan di atas telah menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi Indonesia selama ini telah menghasilkan pertumbuhan tinggi bagi sebagian kecil anggota masyarakat, kemiskinan bagi banyak orang dan ketergantungan bagi semuanya. Pertumbuhan tinggi yang dinikmati sebagian kecil anggota masyarakat ini merupakan pertumbuhan dalam ketergantungan dan sejalan dengan *associated-dependent development*-nya Fernando Hendrique Cardoso.

Pada awal 1980-an mulai timbul kebingungan dalam *state-led economic nationalism* dan *national industrialisation*, disebabkan menurunnya investasi asing dan menurunnya kapasitas Indonesia untuk membiayai program industrialisasinya. Hal ini disebabkan minyak bumi telah melewati puncak kejayaannya dan resesi ekonomi dunia.

Selama periode 1967-1984, menurut Sri Mulyono "telah terealisasi modal asing di luar minyak, gas bumi dan per-bank-an sebesar 6.505 juta dollar AS. Investasi terbesar terjadi pada industri kimia dengan nilai 1.086 juta dollar, diikuti oleh industri tekstil 1.054 juta dollar dan pertambangan 970 juta dollar. Seluruh modal asing itu mampu menyerap tenaga kerja orang Indonesia sebanyak 473.717 dengan tenaga kerja terbanyak berada pada industri barang logam sebanyak 88.762 orang, diikuti oleh industri tekstil dan pertanian masing-masing sebanyak 84.334 orang dan 83.126 orang".

Walaupun *impact* awal investasi MNC kelihatannya cukup menggembirakan, namun dalam tahap-tahap selanjutnya ternyata memprihatinkan bagi rakyat banyak. Kehadiran MNC yang diharapkan akan mengisi gap antara "*domestically available supplies of saving, foreign exchange, government revenue and skill*" dengan "*the planned level of these resources necessary to achieve development target*", menambah penghasilan pajak bagi negara, mendapatkan pengalaman *management*, semangat *entrepreneurial*, kemampuan teknologi yang akan ditransfer ke *local counterpart* dengan *learning by doing*, ternyata pada tahap berikutnya telah banyak melahirkan masalah.

Masalah-masalah yang timbul diantaranya adalah menurunnya *domestic investment*, karena kalah berkompetisi dengan modal asing. Disamping itu MNC tidak me-"*reinvest*" *profit* yang diperolehnya, tetapi mentransfer ke perusahaan induk di negara asal mereka, tidak menggunakan *intermediate product* dari domestik, tetapi mengimpor dari *overseas affiliates*-nya. Walaupun MNC membayar pajak, tapi mereka mendapatkan *tariff protection*. Juga dapat menghindari *local tax* dari pembelian *intermediate product* dari *overseas affiliates* dengan merendahkan harga yang dicantumkan, yang mana sering disebut *transfer pricing*.

MNC menerapkan *capital-intensive* dalam produksinya, bukannya *labour-intensive*. Disamping itu MNC cenderung mempromosikan sebagian kecil staff-nya dengan membayar mahal, sedangkan sebagian besar buruh upahnya rendah, sehingga terjadi jurang perbedaan gaji yang menyolok.. Mereka tidak memproduksi barang-barang kebutuhan pokok seperti makanan, tetapi membuat *product* yang canggih untuk kebutuhan elit lokal. Dengan kekuatan iklannya, mereka juga menimbulkan semangat konsumerisme. MNC dengan kekuatan ekonominya dapat mempengaruhi *government policy* dalam menentukan arah pembangunan dan akhirnya dalam

kasus-kasus yang lebih ekstrim di tingkat politik, MNC dapat memanfaatkan pejabat-pejabat yang korup serta dapat mempengaruhi politik negara.

Korupsi yang lahir ditengah-tengah semangat konsumerisme itu oleh sebagian orang hanya dianggap masalah teknis. Ketidak-berhasilan Indonesia di-analisa dengan menyalahkan birokrasi tetapi dalam bentuk lain, yaitu bahwa birokrasi terlampau kuat dan dikaitkan dengan kapitalisme. Padahal korupsi bukanlah masalah teknis, tetapi karena sistem. Mengapa? Karena sistem kapitalis merangsang kemewahan. Menurut Budiman “hanya menindak koruptor, tanpa merubah sistem tidak logis”. Korupsi itu juga disebabkan peraturan-peraturan yang tidak jelas dan tidak dilaksanakan secara konsisten, misalnya untuk mendapatkan ijin harus melalui beberapa tanda-tangan birokrat, yang berarti menambah biaya bagi investor. Pendapat ini dikuatkan oleh Harold Crouch yang mengatakan :

*“There are countless stories of foreign investors in Indonesia being discouraged by the need to get the approval of a large number of agencies and to make a large number of pay off”.*

Menurunnya secara drastis modal asing pada tahun 1984 dan di tahun 1985 sampai awal 1986 keadaan ekonomi Indonesia yang masih belum menunjukkan adanya perbaikan, sedangkan menarik investasi asing juga sulit menyebabkan pemerintah berikhtiar mencari jalan keluarnya. Di tahun 1986 keluar paket 6 Mei yang bertujuan merangsang investasi modal asing maupun modal dalam negeri, yang berkegiatan untuk mengangkat ekspor non migas. Pada tahun 1986 dan 1987 prestasi ekonomi Indonesia belum juga membaik, Yang penting untuk dijaga adalah stabilitas politik, karena kekurangan-kekurangan dalam pembangunan dapat meningkatkan ketidak-stabilan politik. Tetapi nampaknya kita menghadapi dilema, karena mengutamakan stabilitas akan mematikan kreatifitas, seperti yang dikatakan Sritua Arief dan Adi Sasono : “bahwa memang betul pembangunan membutuhkan stabilitas, tetapi ia membutuhkan iklim bebas yang menumbuhkan kreatifitas. Pembangunan membutuhkan modal, ilmu dan teknologi, tetapi lebih utama lagi pembangunan membutuhkan idealisme dan patriotisme sebagai landasannya”.

## KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun terjadi industrialisasi di Indonesia pada era tersebut dan pembangunan meningkat, tetapi terjadi ketergantungan pada modal asing, baik investasi asing dalam bentuk multinational corporations maupun bantuan asing lain seperti pinjaman dan sebagainya. Selain *capital intensive*, industri pada multinational corporations juga lebih senang menggunakan teknologi tinggi, yang mengakibatkan industri di Indonesia lebih tergantung pada peralatan impor dan teknisi asing.

Pengalaman di Indonesia sejauh ini, pembangunan dan industrialisasi, walaupun meningkatkan GDP, dimana yang masuk perhitungan product-product yang dihasilkan perusahaan-perusahaan asing dan nasional, tetap disertai ketergantungan (*associated-dependent development*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, S. dan A. Sasono 1984, *Ketergantungan dan Keterbelakangan*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta.
- Budiman, A. *Pembangunan di Dunia Ketiga : Teori dan Ideologi*, PPS-UKSW, 1987
- Budiman, A. “Kebudayaan Kekuasaan atau Sosiologi Kekuasaan?”, *Prisma* No. 3, Maret 1987
- Cardoso, F. H. 1973, “Associated-dependent Development : Theoretical and Practical Implication”, *Authoritarian Brazil, Origin, Policies and Future*, New Haven and London, Yale University Press.
- Gilpin, R. 1975, *U.S. Power and The Multinational Corporation*, Basic Books, INC, Publisher, New York.
- Mulyono, S. “Merayu Modal Asing”, *Kompas*, 27 Februari 1987
- Robison, R. “Struktur Kapitalisme Indonesia dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi”, *Prisma* No. 1, Januari 1982
- Robison, R. 1986, *Indonesia : The Rise of Capital*, Allen & Unwin Pty, Ltd, North Sydney.
- Sasono, A. “Indonesia dari Ekonomi Terpimpin ke Kapitalisme Terpimpin”, *Prisma* No. 1, Januari 1982